



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020

Pancasila: Jiwa Bangsa Indonesia

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET B SETARA SMP/MTs KELAS IX



MODUL
TEMA 12



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020

Pancasila: Jiwa Bangsa Indonesia

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET B SETARA SMP/MTs KELAS IX



MODUL
TEMA 12

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Setara SMP/MTs Kelas IX
Modul Tema 12 : Pancasila: Jiwa Bangsa Indonesia

- **Penulis:** Dr.At. Sugeng Priyanto, M.Si.
- **Editor:** Dr. Samto; Dr. Subi Sudarto
Dra. Maria Listiyanti; Dra. Suci Paresti, M.Pd.; Apriyanti Wulandari, M.Pd.
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

iv+ 44 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, 1 Juli 2020
Plt. Direktur Jenderal



Hamid Muhammad

Daftar Isi

Judul Modul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Petunjuk Penggunaan Modul	1
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul	3
Pengantar Modul	3
UNIT 1: PANCASILA DALAM GERAK LANGKAH	
DEMOKRASI INDONESIA	6
URAIAN MATERI.....	6
A. Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Masa Orde Lama .	6
B. Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Masa Orde Baru ...	7
C. Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Masa Orde Reformasi	12
PENUGASAN 1	17
UNIT 2: PANCASILA SEBAGAI JIWA PEMBANGUNAN NASIONAL	8
URAIAN MATERI.....	18
A. Pengertian Pembangunan Nasional	18
B. Penerapan Pancasila sebagai Jiwa Pembangunan Nasional.	19
C. Ancaman terhadap Nilai-nilai Pancasila dan Upaya	
Pencegahannya	22
PENUGASAN 2	27
UNIT 3: PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA	28
A. Pengertian Ideologi Terbuka	28
B. Penerapan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka	29
PENUGASAN 3	32
Mari Kita Ingat Kembali	33
Penilaian Formatif	34
Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian	36
Saran Referensi	42
Daftar Pustaka	43
Profil Penulis	44



PANCASILA: JIWA BANGSA INDONESIA

Petunjuk Penggunaan Modul

Selamat datang dan belajar di Modul 12 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Paket B, semoga Anda selalu semangat dan berbahagia! Judul modul 12 adalah “Pancasila: Jiwa Bangsa Indonesia”. Modul ini akan menguraikan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materi modul akan diuraikan dalam beberapa bagian dan dilengkapi dengan tugas-tugas. Tujuan tugas adalah untuk membimbing Anda lebih tekun dalam mendalami isi modul. Modul “Pancasila Jiwa Bangsa Indonesia” akan diuraikan dalam 3 unit dengan materi dan penugasan sebagai berikut.

No	Unit	Materi	Penugasan
1	Pancasila dalam Gerak Langkah Demokrasi Indonesia	A. Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Masa Orde Lama B. Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Masa Orde Baru C. Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Masa Orde Reformasi	Membuat laporan singkat praktik demokrasi Pancasila di lingkungan.

2	Pancasila sebagai Jiwa Pembangunan Nasional	A. Pengertian Pembangunan Nasional B. Penerapan Pancasila sebagai Jiwa Pembangunan Nasional C. Ancaman terhadap Nilai-nilai Pancasila dan Upaya Pencegahannya	Membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila.
3	Pancasila sebagai Ideologi Terbuka	A. Ideologi Terbuka B. Penerapan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka	Membuat laporan singkat pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar yang menjadi tantangan nilai-nilai Pancasila.

Dalam mempelajari modul, Anda melakukannya dengan tiga pendekatan. *Pertama*, Anda dapat belajar mandiri dengan membaca dan mengerjakan tugas-tugas dalam modul. *Kedua*, Anda dapat belajar kelompok dengan Warga Belajar lain, sehingga diharapkan bisa berkembang tutor sebaya. *Ketiga*, pendekatan tutorial dengan bimbingan dari Tutor. Bila Anda mengalami kesulitan dalam kegiatan mandiri dapat bertanya dengan Tutor. Anda hendaknya membaca modul ini secara utuh dari awal sampai akhir dengan harapan dapat memahami materi secara sistematis.

Tujuan utama mata pelajaran PPKn adalah membentuk warga negara yang baik. Hal tersebut dapat diketahui melalui pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Anda harus mengerjakan tugas dalam setiap unit pembelajaran untuk mengukur ketercapaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi penilaian dalam modul ini. Anda dapat dinyatakan menguasai kompetensi dalam modul ini bila penilaian sikap minimal Baik (dari Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang), penilaian aspek pengetahuan minimal nilai 75 (dari predikat A= 92-100, B= 83-91, C=75-82, D= 66-74, E= 0-65), dan penilaian aspek keterampilan minimal nilai 75 (dari predikat A= 92-100, B= 83-91, C=75-82, D= 66-74, E= 0-65). Oleh karena untuk memastikan ketercapaian pembelajaran, Anda dapat mengkonfirmasikannya kepada Tutor. Bila sudah dinyatakan telah mencapai batas penilaian minimal, maka Anda dapat mempelajari modul berikutnya.

Selamat belajar dan sukses dalam meraih masa depan!

Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Kompetensi pembelajaran yang harus Anda kuasai di dalam modul ini mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut secara rinci dapat dilihat di bawah ini.

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya dalam praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
2. Membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat seperti adanya ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, perubahan nilai sesuai perkembangan zaman, dan ideologi terbuka, dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
3. Melakukan penelitian sederhana dengan cara menyajikan hasil perbandingan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Pengantar Modul

Kita telah memasuki era Industri 4.0 yang ditandai oleh penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang kehidupan. Gerak dinamis bangsa Indonesia dalam pembangunan dimaksudkan untuk mencapai cita-cita nasional bersama. Cita-cita tersebut sebagaimana dituangkan dalam Alinea Kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila benar-benar menjadi jiwa bangsa Indonesia sesuai dengan judul modul 12 ini.

Selanjutnya masuk dalam *Unit 1 Pancasila dalam Gerak Langkah Demokrasi Indonesia*, Anda mengenal lebih dalam kekuatan Pancasila pada era perang kemerdekaan. Masa itu Pancasila menjadi pengikat dan memotivasi semangat persatuan Indonesia untuk

mempertahankan kemerdekaan. Berlanjut pada waktu Indonesia membangun, Pancasila menjadi sumber inspirasi dan cita-cita yang selalu diperbaharui sesuai perkembangan zaman. Semua komponen bangsa Indonesia saling bahu-membahu melawan rongrongan Belanda yang hendak menjajah kembali. Rakyat bersama tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan tidak gentar menghadapi serbuan tentara Belanda. Sikap tentara Belanda menggunakan berbagai cara untuk melumpuhkan semangat persatuan bangsa Indonesia. Salah satu catatan sejarah yang memilukan bagi bangsa Indonesia adalah (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1985: 239):

Pada saat tanda-tanda perdamaian mulai kelihatan setelah berlangsungnya KMB (Konferensi Meja Bundar), bangsa Indonesia dikejutkan oleh keputusan pihak Belanda yang menghukum mati seorang pejuang Sulawesi Selatan, Robert Wolter Monginsidi.

Monginsidi adalah seorang pejuang muda pemimpin gerakan kemerdekaan di Sulawesi Selatan. Hukuman mati tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 September 1949 di Makassar, sekarang Ujungpandang.

Robert Wolter Monginsidi memberikan inspirasi kepada kita semua, betapa pentingnya membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Teladan Robert Wolter Monginsidi mencerminkan nilai Persatuan Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh sila ketiga Pancasila. Selepas dari masa-masa perang kemerdekaan, bangsa Indonesia memasuki era baru dalam konsolidasi bersama menggali semua potensi untuk pembangunan Indonesia.

Unit 2 Pancasila Sebagai Jiwa Pembangunan Nasional memberikan pembelajaran bahwa dalam menggali kekuatan pembangunan, tidak tertutup kemungkinan munculnya konflik dalam masyarakat. Catatan Suroyo (2002: 24-25) menggambarkan situasi konflik tersebut.

Konflik-konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, atau pertentangan ideologi antara negara dan warga negara yang berlanjut dengan keinginan mendirikan satu negara hampir selalu didukung oleh organisasi politik tertentu yang memiliki jaringan di daerah-daerah sehingga memiliki kekuatan dan daya bertahan yang cukup liat. Hal ini menyebabkan pemerintah cukup sulit untuk memulihkan hubungan vertikal dengan rakyat di daerah atau kelompok-kelompok ideologis setelah tindakan keamanan terpaksa dilakukan.

Tidak berbeda dengan konflik vertikal, konflik horizontal antarsuku atau antargolongan, khususnya golongan umat beragama seringkali juga memiliki hubungan atau jaringan vertikal dengan organisasi atau kelompok-kelompok di tingkat pusat. Di samping organisasi-organisasi politik atau sosial yang resmi, larangan mendirikan partai politik pada masa Orde Baru (selain tiga partai yang diizinkan) mendorong tumbuhnya ratusan, bahkan ribuan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepedulian menolong dan mendampingi rakyat kecil dalam mengatasi masalah-masalah kemiskinan dan ketidakadilan. Kelompok LSM ini dapat bergabung dengan golongan yang bertikai, yang dapat membantu penyelesaian pertikaian, atau memperuncing pertikaian.

Unit 3 Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka mengingatkan kita semua akan tantangan ke depan dari bangsa dan negara Indonesia yang ber-Pancasila tentu masih berlanjut sesuai perkembangan zaman. Dalam situasi yang demikian mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi kunci untuk tetap pada jalur cita-cita nasional.

Uraian Materi

A. Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Masa Orde Lama

Gerak langkah demokrasi Indonesia pada masa Orde Lama antara lain dapat dilihat melalui Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Dalam Pasal 1 tentang Dasar-Azas Pendidikan Nasional dinyatakan, bahwa:

Pancasila-Manipol/Usdek adalah Moral dan falsafah hidup bangsa Indonesia serta merupakan manifesto persatuan bangsa dan wilayah Indonesia, demikian pula merupakan perasan kesatuan jiwa sebagai *Weltanschauung* Bangsa Indonesia dalam penghidupan nasional sebagai landasan bagi semua pelaksanaan pendidikan nasional adalah Pancasila-Manipol/Usdek. Dengan demikian, Pancasila-Manipol/Usdek harus menjiwai semua segi pendidikan nasional.

Manipol/Usdek merupakan akronim dari Manifesto politik/Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.

Pelaksana pendidikan nasional Pancasila adalah Panitia Pembina Djiwa Revolusi. Dalam pandangan Arif (dalam *Prisma*, Vol. 7, No. 2, 2018: 161), pendidikan nasional Pancasila meletakkan Pancasila sebagai ideologi politik. Kepentingan utamanya adalah kelangsungan revolusi politik. Materi pendidikan nasional Pancasila dinamakan “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi)”. Ketujuh bahan pokok indoktrinasi tersebut adalah:

1. Lahirnya Pancasila, Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.
2. Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.
3. Manifesto Politik beserta perinciannya dari DPA.
4. Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama Djarek (Djalannya Revolusi Kita), beserta perinciannya dari DPA.

5. Pidato Presiden di muka Sidang Umum PBB tanggal 30 September 1960 beserta perinciannya dari DPA.
6. Penjelasan Manipol dan Usdek (UUD 1945-Sosialisme Indonesia-Demokrasi Terpimpin-Ekonomi Terpimpin-Kepribadian dalam Kebudayaan Nasional); rangkaian pidato-radio Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi, H. Roeslan Abdulgani.
7. Amanat Presiden pada Sidang Pleno Depernas mengenai Pembangunan Semesta Berencana tanggal 28/8 tahun 1959 yang diucapkan dan yang ditulis (Penerbitan Khusus Deppen RI No 165).

Lebih lanjut dalam “Bahan-bahan Indoktrinasi” (Jajasan Prapantja, 1964) dilengkapi dengan:

1. Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1960 tentang Garis-garis Besar daripada Haluan Negara.
2. Manifesto Politik R.I. (Penemuan Kembali Revolusi Kita yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1959 oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.
3. Djalannya Revolusi Kita (Djarek), Pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960.
4. Membangun Dunia Kembali, Pidato Presiden di muka Sidang Umum PBB pada tanggal 30 September 1960.
5. Revolusi Sosialisme Indonesia Pimpinan Nasional (RESOPIM), Pidato Preseiden pada tanggal 17 Agustus 1961.
6. Tahun Kemenangan (TAKEM), Pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1962.
7. Genta Suara Revolusi Indonesia, Pidato Presiden pada tgl. 17 Agustus 1963.

Nilai-nilai Pancasila dalam Masa Orde Lama berada pada posisi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mempersatukan bangsa Indonesia dalam tahapan konsolidasi. Nilai-nilai Pancasila menjadi arah pentingnya berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Tantangan utamanya adalah upaya penjajah untuk menguasai Indonesia kembali. Di samping berbagai kelompok masyarakat melakukan kritik kepada pemerintah, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa masih mendominasi panggung politik.

B. Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Masa Orde Baru

Posisi Pancasila pada masa Orde Baru disosialisasikan secara masif kepada seluruh pejabat negara dan anggota masyarakat dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Hal yang demikian sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa). Pasal 1 ketetapan MPR tersebut

menyatakan, bahwa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Batang Tubuh dan Penjelasannya. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 4, bahwa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warganegara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.

Pancasila dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 dipahami seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima Sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Dengan berpangkal tolak dari kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, maka penghayatan dan pengamalan Pancasila akan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) merinci sila-sila Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bagi warga negara dan penyelenggara pemerintahan negara. Rincian tersebut selengkapnya dapat diperhatikan dari masing-masing sila Pancasila di bawah ini.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan

yang adil dan beradab. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan “tepa salira”, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain.

3. Sila Persatuan Indonesia

Dengan Sila Persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi, berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Oleh karena sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta kepada

tanah air dan bangsanya, maka dikembangkanlah rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dengan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan Masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Di sini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung-jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama. Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayainya.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dengan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Demikian juga dipupuk sikap suka bekerja keras dan sikap

menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Demikianlah dengan ini ditetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dinamakan Ekaprasetia Pancakarsa. Ekaprasetia, karena Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini bertolak dari tekad yang tunggal, janji yang luhur, kepada diri sendiri bahwa sadar akan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, manusia Indonesia merasa harus mampu mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat. Kesadaran akan kodratnya dan kemampuan mengendalikan diri dan kepentingannya itu merupakan modal serta mendorong tumbuhnya karsa pribadi untuk menghayati dan mengamalkan kelima sila dari Pancasila, yang karenanya dinamakan Pancakarsa.

Materi penataran P-4 yang utama adalah P-4 itu sendiri sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa). Materi tambahan berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan Kewaspadaan Nasional. UUD NRI Tahun 1945 yang dimaksudkan adalah UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan yang sistematikanya terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Sedangkan GBHN merupakan rencana pembangunan setiap lima tahunan yang ditetapkan oleh MPR untuk dilaksanakan oleh Presiden. GBHN bukan hanya mengikat Presiden sebagai mandataris MPR, tetapi juga menjadi tolok ukur pelaksanaan pembangunan yang menjadi kebijaksanaannya. Adapun materi Kewaspadaan Nasional dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan dan ketajaman diri dan masyarakat dalam mendeteksi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pelaksanaan Penataran P-4 menjadi tanggung jawab Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Kelembagaan BP-7 ada di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Dalam pandangan Arif (dalam *Prisma*, Vol. 7, No. 2, 2018: 161), bahwa pendekatan yang digunakan oleh BP-7, Pancasila ditempatkan sebagai nilai-nilai normatif yang kepentingannya untuk kelangsungan pembangunan ekonomi. Apa yang dikemukakan oleh Arif tersebut bersifat menyederhanakan persoalan, karena kenyataannya Penataran P-4 membahas Pancasila dari berbagai sudut kehidupan yakni ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara.

C. Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Masa Orde Reformasi

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) merupakan salah satu dari Ketetapan MPR yang pelaksanaannya ditinjau kembali berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Akibatnya Penataran P-4 sebagai wahana pendidikan Pancasila yang diselenggarakan oleh BP-7 tidak diselenggarakan lagi.

Menarik juga kalau kita membaca pandangan berbeda dari artikel yang ditulis oleh Dudun Parwanto (Kompasiana, 2014) yang menyayangkan pembubaran BP-7. Hal itu dikarenakan masyarakat sudah jenuh melihat dinamika sosial politik yang kebablasan di negeri ini. Rakyat lambat namun pasti ingin kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa. Ideologi dunia yang berkembang pada era globalisasi dirasa tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Rakyat mulai capek disuguhi tayangan televisi yang mempertontonkan konflik sosial di akar rumput maupun konflik para elite politik. Tentu saja, cara atau strategi yang digunakan untuk menegakkan praktik-praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan nilai-nilai dalam Pancasila yang disesuaikan dengan kondisi jaman sekarang. Cara-cara menggurui atau mendikte layak untuk ditinggalkan, diganti dengan cara kreatif dan edukatif yang melibatkan partisipasi semua pihak. Strategi guna mendayagunakan institusi dan pranata masyarakat (LSM, perkumpulan, agama, pemerintah, adat, swasta, dan lain-lain) untuk menegakkan Pancasila jika ada praktik-praktik ataupun kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila.

Pembudayaan Pancasila digalakkan lagi pada masa Orde Reformasi dengan dibentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017. Tugas UKP-PIP mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. UKP-PIP lebih lanjut ditingkatkan statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.

BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penjurusan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

BPIP dalam pandangan Arif (dalam *Prisma*, Vol. 7, No. 2, 2018: 161), bahwa Pancasila dipahami sebagai konsepsi demokratis. Pengembangan dialog ilmiah Pancasila sebagai peningkatan kualitas demokrasi. Sosialisasi Pancasila dilakukan dengan model dialogis dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan menempatkan Pancasila sebagai kajian ilmiah dari berbagai perspektif. Mengaitkan dengan kehidupan milenial, praktik kehidupan warga negara yang berpedoman Pancasila perlu disosialisasikan dengan cara kreatif sesuai target sasaran kaum milenial. Berikut artikel yang diharapkan dapat membuka wawasan Anda sebagai kaum milenial untuk tampil dalam gaya hidup yang Pancasila.

Pancasila dan Tantangan Milenial

Mardiyanto – detikNews, Sabtu, 01 Jun 2019 11:38 WIB

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia merupakan seperangkat nilai yang menjadi pandangan hidup (*way of life*) bagi negara Indonesia. Kondisi itu meniscayakan bahwa fondasi bernegara dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Konsensus cerdas para pendiri negara tersebut berangkat dari sebuah paham kebangsaan yang terbentuk dari kesamaan nasib, sepenanggungan, dan sejarah serta adanya cita bersama untuk menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam sebuah negara kesatuan.

Adanya prinsip bersatu dalam perbedaan membuat Pancasila menjadi semakin kuat dan layak sebagai sebuah ideologi bagi negara Indonesia yang khas dengan keanekaragamannya. Konsep persatuan yang ideal dengan mengkondisikan setiap warga negara hidup berdampingan dan gotong royong tanpa menghilangkan identitas suku bangsa, adat istiadat, ras, ataupun agama.

Dalam definisi tertentu, Pancasila sebenarnya Indonesia itu sendiri. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan spirit/ruh kebangsaan; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan watak, karakter, dan kepribadian bangsa; Persatuan Indonesia merupakan ikatan kebangsaan; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan

dalam Permusyawaratan/Perwakilan merupakan media/wadah dan alat kebangsaan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan tujuan kebangsaan

Masih Relevan

1 Juni 2019 menjadi penanda bahwa Pancasila sudah berusia 74 tahun. Rentan waktu yang begitu panjang dan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang signifikan menimbulkan beberapa pertanyaan baru di kalangan petinggi negara, akademisi, dan kita semua. Apakah Pancasila masih relevan dengan kondisi negara dewasa ini? Apakah Pancasila masih mampu menjawab setiap tantangan di era perkembangan teknologi, revolusi industri 4.0?

Apakah Pancasila masih bisa menjadi bintang pemandu bagi rakyat Indonesia, khususnya generasi milenial? Kondisi negara Indonesia sudah sangat jauh berubah dari semenjak awal kemerdekaan. Perkembangan dan perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari sebagai prasyarat untuk mencapai kemajuan dan tujuan kemerdekaan. Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mendatangkan manfaat sekaligus dan dampak buruk bagi masyarakat. Kemudahan, kecepatan, dan efektivitas merupakan gambaran umum dampak kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi yang tidak dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah baru yang dapat menghambat atau merusak suatu negara. Generasi milenial adalah generasi yang sangat familier dengan teknologi karena generasi ini lahir ke dunia di mana segala aspek fisik (manusia dan tempat) mempunyai ekuivalen digital.

Di Indonesia populasi generasi milenial mencapai 90 juta jiwa. Itu menandakan kelompok milenial mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia. Ditambah dengan jumlah aktivitas warga negara di dunia maya didominasi oleh anak muda milenial. Generasi milenial menjadi penyokong utama peredaran informasi di dunia virtual.

Pada waktu yang sama ancaman bangsa terus berkembang di setiap bidang. Bidang ideologi (ancaman ekstremisme, paham radikal), bidang politik (permasalahan pemilu, pejabat negara yang terjerat korupsi), bidang ekonomi (kesenjangan yang masih tinggi), bidang sosial budaya (pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga), bidang pertahanan dan keamanan (terorisme, konflik SARA, ilegal fishing). Revolusi industri 4.0 juga membawa disruption and bridging generations. Terdapat gap antargenerasi dalam sebuah pola komunikasi sehingga terjadilah disrupsi atau perubahan mendasar terhadap suatu realitas.

Fakta sosiologis di atas seolah menciptakan sebuah ilusi bahwa Pancasila telah gagal menjawab setiap tantangan zaman. Kegagalan mendiagnosis permasalahan yang ada menyebabkan lahirnya ide penyelesaian yang tidak solutif dan memperburuk keadaan. Apabila kita melihat secara komprehensif dan merasakan suasana kebatinan setiap masalah yang ada maka sebenarnya yang terjadi adalah terdapatnya upaya untuk menggantikan atau melunturkan Pancasila sebagai jati diri bangsa dan pegangan dalam kehidupan bernegara. Sehingga internalisasi Pancasila dengan metode yang tepat adalah solusi di tengah krisis nasionalisme yang terjadi saat ini.

Menjawab Problematika

Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia merupakan sebuah sistem nilai kebaikan universal yang bisa diterapkan dalam konteks apapun baik pada masa hari ini, besok, dan masa yang akan datang. Itu artinya Pancasila dengan basis filosofinya yang mendalam sebenarnya mampu untuk menjawab setiap problematika yang ada.

Terdapat dua syarat agar Pancasila dapat beroperasi secara optimal dalam masyarakat. Pertama, Pancasila harus terpahami dan terinternalisasi pada setiap individu. Kedua, mampu menggunakan Pancasila sebagai alat penyelesaian masalah.

Pancasila sebagai nilai universal masih sangat relevan dengan generasi hari ini. Pancasila hanya perlu terinternalisasi dengan baik ke setiap generasi yang ada khususnya generasi milenial yang akan menjadi salah satu tokoh pergerakan kemajuan negara yang kita cintai ini.

Nilai-nilai ketuhanan, Indonesia adalah negara religius yang menjadikan nilai-nilai religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas dalam bersikap tindak termasuk sikap tindak dalam dunia virtual. Menghargai perbedaan agama dan kepercayaan dalam bermedia sosial akan menghantarkan ke depan dalam kehidupan beragama. Tidak melontarkan konten penghinaan atau menyudutkan agama dan kepercayaan tertentu membuat kehidupan beragama menjadi tentram dan damai.

Nilai-nilai kemanusiaan, memahami dan menghargai hak dan kewajiban setiap orang dalam berselancar di dunia maya adalah salah satu ciri netizen yang humanis. Tidak menyebarkan konten hoax dan provokasi karena hal tersebut merupakan tindakan yang tidak beradab.

Nilai-nilai persatuan, forum-forum dunia maya juga dapat dijadikan media untuk memperkuat semangat nasionalisme. Memprioritaskan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan atau pribadi saat diskusi di forum-forum dunia maya. Selalu menjunjung tinggi bhinneka tunggal ika dalam setiap perbedaan di dalam forum online.

Nilai-nilai musyawarah dalam hikmat kebijaksanaan, berlaku santun terhadap setiap pandangan politik setiap orang dalam dunia maya. Ikut serta menjalankan setiap keputusan yang dihasilkan melalui diskusi online. Menyelesaikan setiap perdebatan di grup online dengan mengedepankan musyawarah.

Nilai-nilai keadilan sosial, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengakses informasi dan berkumpul dalam kelompok-kelompok dunia maya dengan tetap menghargai hak asasi manusia setiap orang.

Oleh karena itu, di tengah krisis nasionalisme yang sedang melanda negeri ini, Pancasila adalah cahaya penuntun untuk mengenal kembali jati diri bangsa dan perekat untuk mempersatukan perbedaan. Semoga Tuhan yang Maha Esa merahmati dan mencerahkan hati dan pikiran kita semua.

(Mardiyanto, S.H, Ketua Umum Human Illumination DKI Jakarta, mahasiswa Magister Hukum Universitas Pancasila, penggiat diskusi Pancasila)

Sumber: <https://news.detik.com/kolom/d-4573104/pancasila-dan-tantangan-milenial>, diakses tanggal 6 Juli 2020

Artikel di atas membuka wawasan kita dalam hidup di era digital untuk menyikapi dengan mengedepankan persatuan bangsa. Tentulah dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dihadapkan pada proses yang berkesinambungan untuk dapat merealisasikan keyakinan kepercayaan dan agamanya sesuai sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat memiliki dan mendapatkan perlakuan yang bermartabat sebagaimana sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bersatunya komponen masyarakat sebagai gerak langkah bangsa Indonesia yang bersatu sesuai sila Persatuan Indonesia. Kehidupan yang demokratis dalam segala lini kehidupan sejalan dengan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kesejahteraan yang merata sesuai sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PENUGASAN 1

Amati di lingkungan sekitar Anda, misal kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan, lalu lintas di jalan raya, kegiatan di pasar, atau kegiatan lain saat berselancar di media sosial. Identifikasi praktik demokrasi Pancasila yang sesuai atau yang melanggar nilai-nilai Pancasila dari hasil pengamatan Anda! Selanjutnya hasil pengamatan disusun dalam laporan singkat tentang praktik demokrasi Pancasila dalam kegiatan kehidupan keseharian di lingkungan Anda.

■ Tujuan

Anda telah melakukan pengamatan terkait praktik demokrasi Pancasila di lingkungan sekitar, diharapkan dengan penugasan itu Anda mampu:

- Identifikasi peristiwa-peristiwa terkini terhadap ancaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
- Menggunakan pengetahuan tentang pemahaman Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara untuk menyeleksi praktik-praktik baik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar.

■ Media

Kertas folio, Whatshapp, email

■ Langkah-Langkah

- Pelajari materi yang ada di modul
- Melakukan pengamatan di lingkungan sekitar
- Hasil pengamatan dicatat, foto lah kegiatan-kegiatan yang menarik
- Menyusun laporan singkat tentang hasil pengamatan dan identifikasi praktik yang sesuai atau melanggar nilai-nilai Pancasila
- Mengirim laporan singkat ke Tutor untuk dinilai dan perbaikan berdasarkan masukan dari Tutor.

Uraian Materi

A. Pengertian Pembangunan Nasional

Bangsa Indonesia sampai saat ini kelihatannya masih sepakat dengan rumusan pembangunan nasional zaman Orde Baru yang dituangkan dalam setiap Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam GBHN dinyatakan, bahwa pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional meletakkan keseimbangan antara pembangunan lahiriah dan yang batiniah. Pembangunan lahiriah seperti pemenuhan bahan pangan, kesehatan, sandang, perumahan, dan berbagai infrastruktur yang lain. Sedangkan pembangunan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, keadilan hukum, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, dan berbagai jaminan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan setelah GBHN dihapuskan, rencana pembangunan nasional dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025. Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antarbangsa semakin kuat.

Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu bangsa menjadikan bangsa tersebut lebih makmur dan lebih maju. Negara yang maju pada umumnya adalah negara yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Negara yang maju umumnya adalah negara yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.

Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian, bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

B. Penerapan Pancasila sebagai Jiwa Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 antara lain menyatakan, bahwa:

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. Landasan idiil RPJP Nasional adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional.

Dengan demikian, Pancasila merupakan jiwa pembangunan nasional Indonesia. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam misi pembangunan nasional.

Misi pembangunan nasional yang pertama, mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Maksudnya adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Mewujudkan bangsa yang berdayasaing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing merupakan misi kedua RPJP nasional. Capaiannya dapat berupa meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan. Termasuk di dalamnya membangun infrastruktur yang maju. Serta reformasi di bidang hukum dan aparaturnegara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

Misi pembangunan nasional yang ketiga, mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Dalam hal ini adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Misi pembangunan nasional yang keempat, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme POLRI agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontraintelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

Misi pembangunan nasional yang kelima, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Misi pembangunan nasional yang keenam, mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Misi pembangunan nasional yang ketujuh, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Misi pembangunan nasional yang kedelapan, mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam

rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pematapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Penerapan Pancasila sebagai jiwa pembangunan nasional melalui visi dan misi pembangunan nasional berjalan secara berkesinambungan dan saling mengisi dan memperkuat untuk mencapai tujuan nasional yang semakin bermutu. Upaya meningkatkan mutu pembangunan yang dilandasi nilai-nilai Pancasila menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, di dalamnya masyarakat harus dapat mengambil peran yang maksimal. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan sejalan dengan amanat sila kelima Pancasila, misalnya kemandirian pangan. Tercukupinya kebutuhan pangan nasional dari dalam negeri.



Gambar 12.1

Panen padi salah satu komoditas pokok bahan pangan di Indonesia. Dengan panen yang melimpah diharapkan kemandirian pangan Indonesia dapat diwujudkan dari tahun ke tahun.

Sumber: <https://jogja.suara.com/read/2020/04/26/153500/hadapi-pandemi-corona-dprd-yogyakarta-sebut-stok-beras-perlu-ditambah>

C. Ancaman terhadap Nilai-nilai Pancasila dan Upaya Pencegahannya

Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Hal ini antara lain yang merupakan ancaman nyata terhadap nilai-nilai Pancasila. Dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah, maka Pancasila sebagai pandangan hidup yang menuntun dan mengarahkan pada cita-cita nasional akan

sulit tercapai. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi ancaman tersebut adalah meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi, antara lain, adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antarjenis kelamin.

Tabel 12.1

Persentase Penduduk Buta Huruf menurut Kelompok Umur, Tahun 2019

No	Provinsi	Persentase Penduduk Buta Huruf (Persen)		
		Umur		
		15+	15-44	45+
1	Aceh	1.79	0.06	5.74
2	Sumatera Utara	0.85	0.18	2.19
3	Sumatera Barat	0.83	0.10	2.10
4	Riau	0.79	0.10	2.46
5	Jambi	1.80	0.23	5.04
6	Sumatera Selatan	1.24	0.20	3.31
7	Bengkulu	1.99	0.17	5.76
8	Lampung	2.89	0.12	7.87
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.91	0.60	4.63

10	Kepulauan Riau	1.00	0.12	3.36
11	DKI Jakarta	0.26	0.05	0.71
12	Jawa Barat	1.47	0.21	3.79
13	Jawa Tengah	6.46	0.26	14.76
14	DI Yogyakarta	5.04	0.05	11.56
15	Jawa Timur	7.68	0.93	16.72
16	Banten	2.38	0.12	7.55
17	Bali	5.47	0.17	13.35
18	Nusa Tenggara Barat	12.41	2.46	32.07
19	Nusa Tenggara Timur	6.76	2.51	15.26
20	Kalimantan Barat	6.79	1.46	17.80
21	Kalimantan Tengah	0.78	0.11	2.34
22	Kalimantan Selatan	1.50	0.15	4.15
23	Kalimantan Timur	0.97	0.18	2.69
24	Kalimantan Utara	3.61	0.75	10.23
25	Sulawesi Utara	0.20	0.08	0.39
26	Sulawesi Tengah	1.78	0.71	3.85
27	Sulawesi Selatan	7.55	1.72	18.08
28	Sulawesi Tenggara	5.09	0.94	14.30
29	Gorontalo	1.25	0.31	3.12
30	Sulawesi Barat	6.41	2.31	15.65
31	Maluku	0.61	0.55	0.74
32	Maluku Utara	1.21	0.27	3.50
33	Papua Barat	2.28	1.53	4.34
34	Papua	22.00	20.21	27.11
INDONESIA		4.10	0.76	9.92

Sumber: Badan Pusat Statistik

Contoh Tabel 12.1 tersebut menunjukkan, bahwa pada kelompok usia produktif, antara 15-44 tahun, di beberapa provinsi masih banyak penduduk yang buta huruf, seperti di Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara pada usia sekolah, Provinsi Papua, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan menempati posisi terbanyak yang buta huruf.

Tantangan lain dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, antarjenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan daya saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan bonus demografi.

Contoh tantangan bidang kesehatan dan bidang pendidikan di atas mencerminkan, bahwa pembangunan manusia yang diamanatkan oleh sila Kemanusiaan yang adil dan beradab belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tantangan ini hendaknya menjadi motivasi, bahwa membangun bangsa dan negara Indonesia sesuai sila-sila Pancasila harus dilakukan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Tanggung jawab terbesar dalam membangun masyarakat bangsa dan negara Indonesia terletak pada tanggung jawab warga negaranya. Apa yang sudah diri kita lakukan untuk membangun bangsa dan negara ini? Pertanyaan ini tentu mengusik nurani kita, apa saja yang sudah kita lakukan untuk bangsa dan negara? Mungkin hal-hal kecil yang kita lakukan di lingkungan sekitar, meskipun hanya di lingkup terkecil tetapi memberikan kebermanfaatn di lingkungan sekitar. Berikut cerita karya anak muda yang membawa perubahan dan ini dapat menjadi contoh bagi Anda untuk berbuat kebaikan untuk lingkungan.

KOMUNITAS

Berkarya Untuk Perubahan

Komunitas kini jadi salah satu pilar penting untuk melakukan perubahan. Mereka yang punya hobi sama serta ikatan emosional yang kuat berkumpul dalam komunitas dan membuat beragam kegiatan positif. Seiring berjalannya waktu, komunitas menawarkan solusi dari berbagai masalah dan pemberdayaan bagi masyarakat dan bangsa. Tentu saja dengan semangat gotong royong dan sukarela.

Salah satunya, komunitas Clean Divers Action (CDA) yang dibentuk tahun 2015. CDA berawal dari keprihatinan sejumlah penyelam yang menemukan banyak sampah plastik di laut saat menyelam. Ide sederhana pun digagas Swietenia Puspa Lestari

yang hobi menyelam untuk mengajak sesama penyelam membersihkan sampah laut saat menyelam. Kemudian, DCA menjadi yayasan supaya bisa berkontribusi lebih luas, terutama untuk menjangkau anak-anak muda yang peduli pada masalah lingkungan. Dukunganpun mengalir untuk meluaskan kiprah DCA mengedukasi masyarakat membereskan masalah sampah laut.

Komunitas lainnya adalah Warung Baca Mata Air di Tangerang Selatan yang berjuang untuk menumbuhkan literasi di kalangan anak-anak dan remaja. Komunitas yang didirikan Sisi Wahyu ini sudah mulai berkegiatan sejak tahun 2008.

Mereka yang datang ke komunitas sebagian besar merupakan anak-anak kurang mampu. Bahkan, beberapa dari mereka sudah putus sekolah, tetapi mempunyai kemauan untuk belajar. "Saya lebih mengutamakan anak-anak yang membutuhkan perhatian, anak yatim, atau mereka yang kurang mampu. Kami pun seperti sebuah keluarga,"katanya.

Warung Baca Mata Air memiliki program terapan literasi, kelas teknologi informasi, dan wirausaha. Namun, tak mudah mengajak anak-anak untuk membaca buku. Mereka datang dan pergi sesuka hati. Untuk itulah, Sisi mengajak para mahasiswa bergabung menjadi sukarelawan. Dengan berbagai cara, Sisi mempertahankan komunitas tetap berjalan.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada yang juga Direktur Eksekutif Youth Studies Center Fisipol UGM, Oki Rahardianto mengatakan, saat ini, komunitas menjadi ruang publik yang diciptakan masyarakat, khususnya anak muda. Apalagi, mereka dimudahkan dengan fasilitas teknologi digital yang semakin maju. Komunitas perlu diberikan ruang yang bebas untuk berekspresi karena generasi muda yang terus berkembang. Di kalangan anak muda, terlihat marak komunitas yang bebas berekspresi tanpa takut alasan moral, agama, ataupun sosial. Banyak yang tumbuh untuk merespon isu yang terjadi, baik kultural, ekonomi, maupun politik. Pemerintah dan dunia swasta dapat merangkul dan membantu komunitas untuk membangun kapasitas sumber daya. Dengan demikian, komunitas bisa menyumbangkan berbagai solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat.

Sumber: diringkas sesuai kebutuhan dari artikel Kompas, tanggal 15 Januari 2020, hal. 17.

Contoh di atas tentang semakin banyak komunitas anak muda yang membuat program pemberdayaan sebagai solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat. Itu lah tanggung jawab warga negara yang berkarya sebagai praktik kebaikan membangun bangsa dan negara Indonesia melalui landasan nilai-nilai Pancasila. Kita tidak hanya menuntut hak,

tetapi tuntutan hak harus seimbang dengan kewajiban dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

PENUGASAN 2

Lakukan pengamatan dan wawancara kepada tokoh masyarakat atau warga di lingkungan Anda tentang program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi masyarakat, atau perusahaan swasta. Misal perbaikan jalan di lingkungan Anda, penerangan jalan raya, layanan transportasi umum, ketersediaan pusat kesehatan masyarakat, sekolah, atau pusat kegiatan belajar masyarakat, dan taman bacaan. Anda catat dan dokumentasikan dengan foto-foto semua penjelasan tentang program-program pembangunan di lingkungan Anda. Selanjutnya Anda membuat laporan singkat.

■ Tujuan

Setelah Anda melakukan pengamatan dan wawancara tentang program-program pembangunan di lingkungan sekitar, diharapkan melalui penugasan ini Anda mampu

- **Melakukan identifikasi program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, atau pihak lain di lingkungan**
- **Menyimpulkan manfaat program pembangunan untuk masyarakat sebagai tindakan yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila**

■ Media

Kertas folio atau WhatsApp atau e-mail

■ Langkah-Langkah

- **Pelajari materi yang ada di modul**
- **Melakukan pengamatan di lingkungan sekitar dan lakukan wawancara**
- **Hasil pengamatan dicatat, foto lah hasil pembangunan yang menarik**
- **Menyusun laporan singkat tentang hasil pengamatan dan identifikasi program-program pembangunan yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila**
- **Mengirim laporan singkat ke Tutor untuk dinilai dan perbaikan berdasarkan masukan dari Tutor.**

Uraian Materi

A. Pengertian Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar yang dapat dilihat dalam sikap, perilaku, dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bersifat khas sebagai refleksi perilaku bangsa Indonesia dan tercermin dalam setiap segi kehidupannya. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat dinamis. Artinya, upaya pengembangan sesuai dengan perubahan dan tuntutan masyarakat bukan sesuatu yang tabu sehingga nilai-nilai dasar itu tidak menjadi beku, kaku, dan melahirkan sifat fanatik yang tidak logis. Atas dasar pemikiran tersebut, bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Pandangan tentang pentingnya Pancasila sebagai ideologi terbuka dikemukakan oleh Moerdiono (dalam Oesman, 1996: 399-401), bahwa dinamika pembangunan yang membawa perubahan masyarakat secara cepat memerlukan pemahaman yang baru atas Pancasila. Alasan kedua, kenyataan ideologi tertutup di dunia telah membawa kehancuran negara oleh karenanya Pancasila harus dipahami sebagai ideologi terbuka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Alasan ketiga, dalam pengalaman sejarah Indonesia yang pernah dipengaruhi oleh paham komunisme menempatkan Pancasila sebagai dogma sehingga kebijakan pemerintahan menjadi absolut. Dan alasan terakhir, ingin meletakkan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis, adil, dan makmur.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia, Pancasila sebagai ideologi terbuka karena memenuhi tiga kriteria sebagaimana dikemukakan oleh Alfian (1985: 109-119), yaitu (1) dimensi realita, (2) dimensi idealisme, dan (3) dimensi fleksibilitas. Kehadiran ketiga dimensi yang saling berkaitan, saling mengisi, dan saling memperkuat itu menjadikan suatu ideologi yang kenyal dan tahan uji dari masa ke masa. Dimensi-dimensi sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

1. Dimensi Realitas

Ideologi merupakan hasil konsensus bersama dalam masyarakat. Ideologi merupakan nilai-nilai dasar yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya, terutama pada waktu ideologi itu lahir. Dengan demikian, masyarakat pendukung ideologi itu dapat merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Dengan kata lain, nilai-nilai dasar yang terkristalisasi sebagai ideologi benar-benar tertanam dan berakar dalam kehidupan masyarakatnya. Pancasila dalam kelahirannya merupakan pandangan yang telah tumbuh dan berkembang dalam jiwa bangsa Indonesia. Dalam perdebatan yang panjang di BPUPKI dan PPKI ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

2. Dimensi Idealisme

Ideologi dalam hal ini harus memiliki kualitas yang mendorong masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Ideologi menjadi penggerak pembangunan bersama ke arah persatuan dan kesatuan yang diidealkan. Dengan demikian, bangsa yang memiliki ideologi adalah bangsa yang telah mengetahui ke arah mana mereka akan membangun bangsa dan negaranya. Pancasila diyakini dapat menjadi sumber inspirasi dan semangat membangun bangsa dan negara Indonesia mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3. Dimensi Fleksibilitas

Ideologi harus dapat memberikan dorongan dan memberikan peluang akan munculnya perkembangan masyarakatnya. Masyarakat dapat menemukan interpretasi-interpretasi atas nilai-nilai dasar yang sesuai dengan perubahan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya masyarakat Indonesia sejalan dengan dinamika perkembangan zaman.

B. Penerapan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Penegasan Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam pandangan Suprayogi (2018: 124) bukan saja merupakan suatu penegasan kembali pola pikir yang dinamis dari para pendiri negara kita pada tahun 1945, tetapi juga merupakan suatu kebutuhan konseptual dalam dunia modern yang berubah dengan cepat. Lebih lanjut, Suprayogi (2018:124-125) menjelaskan, bahwa penegasan Pancasila sebagai ideologi terbuka membawa implikasi: (1) bangsa Indonesia harus mempertajam kesadaran akan nilai-nilai dasarnya yang bersifat abadi, dan (2) bangsa Indonesia harus menyadari adanya kebutuhan untuk mengembangkan nilai-nilai dasar secara kreatif dan dinamis untuk menjawab kebutuhan dan tantangan

zaman. Pengertian “terbuka” memang dapat diartikan bermacam-macam. Oleh karena itu, perlu kesepakatan mengenai pengertian “terbuka”. Dikatakan sebagai ideologi terbuka, jika ideologi tersebut memungkinkan terjadinya interaksi antara nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan lingkungan sekitar. Artinya, nilai-nilai dasarnya tetap dipertahankan dan bangsa memiliki kesempatan untuk mengembangkan nilai instrumentalnya.

Nilai-nilai dasar Pancasila adalah sila-sila Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila menjadi landasan pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk perundang-undangan. Perundang-undangan yang demikian disebut nilai instrumental untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai instrumental Pancasila menjadi landasan bagi warga negara Indonesia mempraktikkan kehidupannya sehari-hari. Dalam pengertian yang demikian, Pancasila berada pada nilai praksis, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila sehari-hari. Penjabaran nilai-nilai dasar ini dapat dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu.

Lebih jauh, Suprayogi (2018: 125-126) menjelaskan, bahwa pengertian terbuka adalah terbuka untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar pada tatanan nilai instrumental. Tentu saja perlu digariskan batas-batas keterbukaan tersebut. Sekurang-kurangnya ada dua pembatasan keterbukaan, yaitu kepentingan stabilitas nasional dan larangan terhadap ideologi Marxisme-Leninisme/Komunisme. Apabila kepentingan stabilitas nasional tidak terjaga dimungkinkan akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang akan membawa pada pembubaran Negara Republik Indonesia. Keterbukaan ideologi Pancasila pada tataran nilai instrumental dan nilai praksisnya bukan berarti bangsa Indonesia membuka diri bagi paham komunisme. Sebaliknya, bangsa Indonesia tetap waspada terhadap kerawanan-kerawanan yang mungkin ditimbulkan oleh paham tersebut. Marxisme-Leninisme-Komunisme memiliki wawasan yang negatif terhadap konflik karena tidak mengenal perdamaian. Dalam pandangannya konflik hanya dapat diakhiri, manakala salah satu pihak yang bertentangan mengalami kehancuran. Prinsip menghalalkan segala cara dalam mencapai cita-citanya dipandang sebagai konsep yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.



Gambar 12.2
Beberapa pabrik mobil dari luar negeri beroperasi dan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia.
Sumber: fastnlow.net/wp-content/uploads/2015/11/www.beritasatu.com_.jpg

Gambar 12.2 memberikan gambaran adanya contoh masuknya modal asing, pendirian pabrik mobil dari negara lain di Indonesia, dan pemakaian tenaga kerja oleh perusahaan asing di Indonesia. Hal tersebut mengilustrasikan atas penerapan ideologi Pancasila secara terbuka. Dibuktikan oleh penerimaan perusahaan asing yang kemudian diatur secara instrumental dalam perundang-undangan Indonesia, misalnya tidak dibenarkan keuntungan hanya untuk pemilik perusahaan asing. Keuntungan yang diperoleh bangsa Indonesia, antara lain alih teknologi oleh pekerja Indonesia dan kesempatan bekerja sesuai sila kelima Pancasila. Lebih jauh juga untuk meningkatkan derajat hidup pekerja Indonesia karena memperoleh penghidupan yang layak. Tentu masih banyak yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan mutu hidup manusia Indonesia dengan penerapan ideologi Pancasila yang terbuka. Dalam keterbukaan ideologi ini, nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai saringan, apakah budaya dan hasil pemikiran yang berasal dari luar negeri sesuai dengan kepribadian Indonesia? Apabila sesuai dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memajukan kehidupan bangsa, tetapi sebaliknya apabila tidak sesuai harus kita tolak.

PENUGASAN 3

Amati di lingkungan Anda tentang ragam kehidupan yang dilakukan warga masyarakat sebagai pengaruh globalisasi. Identifikasi pengaruh globalisasi itu yang menjadi tantangan kekuatan nilai-nilai Pancasila. Buat lah laporan singkat dari hasil pengamatan Anda!

■ Tujuan

Dari penugasan tentang pengaruh globalisasi terhadap tatanan nilai-nilai Pancasila dari warga masyarakat, diharapkan Anda mampu

- Identifikasi nilai-nilai Pancasila yang sesuai dan bertentangan dalam menyikapi pengaruh globalisasi yang mewarnai kehidupan masyarakat
- Menerapkan pengetahuan tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam melakukan pilihan terhadap produk atau gaya hidup moderen

■ Media

Kertas folio atau WhatsApp atau e-mail

■ Langkah-Langkah

- Pelajari materi yang ada di modul
- Melakukan pengamatan terhadap gaya hidup warga di lingkungan sekitar
- Hasil pengamatan dicatat, foto lah perilaku warga masyarakat yang menunjukkan gaya hidup mpderen sebagai pengaruh globalisasi
- Menyusun laporan singkat tentang hasil pengamatan dan identifikasi perilaku yang sesuai dan bertentangan terhadap tatanan nilai-nilai Pancasila dalam menyikapi pengaruh globalisasi
- Mengirim laporan singkat ke Tutor untuk dinilai dan perbaikan berdasarkan masukan dari Tutor.



MARI KITA INGAT KEMBALI

Pacasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia sejak kelahirannya memiliki dinamika sejalan kondisi zaman, baik Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Pancasila menjadi motivasi untuk melaksanakan pembangunan nasional. Penerapan Pancasila sebagai jiwa pembangunan nasional melalui visi dan misi pembangunan nasional berjalan secara berkesinambungan dan saling mengisi dan memperkuat suntuik mencapai tujuan nasional yang semakin bermutu. Untuk memperkuat ideologi Pancasila dalam kancah dunia, Pancasila diterapkan sebagai ideologi terbuka. Dengan demikian jalinan kehidupan bangsa Indonesia berada di ruang hiruk-pikuknya perjalanan masyarakat global. Hal-hal yang positif dapat diserap, tetapi yang negatif harus ditolak.



Penilaian Formatif

Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. Robert Wolter Monginsidi memberikan inspirasi kepada kita, betapa pentingnya membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagaimana diajarkan oleh sila Pancasila, yaitu
 - A. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - B. Persatuan Indonesia
 - C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
 - D. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Hukuman mati bagi bangsa Indonesia menjadi dilematis, karena bertentangan dengan sila
 - A. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - B. Persatuan Indonesia
 - C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
 - D. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila secara besar-besaran untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden
 - A. Soekarno
 - B. Soeharto
 - C. Abdurrahman Wahid
 - D. Joko Widodo
4. Ketika seseorang mendapatkan layanan pendidikan yang merata untuk seluruh wilayah Indonesia, maka pemerintah telah menjalankan amanat Pancasila, khususnya sila
 - A. kedua
 - B. ketiga
 - C. keempat
 - D. kelima
5. Pelaksanaan sila Persatuan Indonesia dalam lingkungan sekitar dapat berupa
 - A. mengikuti doa syukur tetangga
 - B. menengok tetangga yang sakit
 - C. mengikuti acara bersih desa
 - D. aktif dalam rapat di kelurahan
6. Pancasila menjadi jiwa pembangunan nasional dalam bentuk
 - A. memeluk agama sesuai keyakinannya
 - B. menerima keberadaan orang tua kita
 - C. memberi kesempatan belajar siswa
 - D. menjalani hidup sebagaimana takdir
7. Sebagai negara kepulauan, maka dalam upaya menegakkan Persatuan Indonesia dapat dilakukan dengan cara
 - A. mengutamakan kesejahteraan masyarakat pulau
 - B. memahami potensi alam pulau yang didiami
 - C. mengusulkan pemajuan pendidikan Indonesia
 - D. bekerja dan mencari nafkah di pulau lain
8. Gaya hidup boros sebagaimana datang dari negara-negara yang menganut ideologi kebebasan, maka tindakan selektif kita didasarkan pada Pancasila, sila ...
 - A. kedua
 - B. ketiga
 - C. keempat
 - D. kelima
9. Pemilihan pimpinan yang didasarkan pada jumlah suara terbanyak sebenarnya tidak sejalan dengan semangat Pancasila, sila
 - A. kedua
 - B. ketiga
 - C. keempat
 - D. kelima
10. Seseorang suka bekerja keras untuk meraih cita-citanya, merupakan bagian dari pelaksanaan Pancasila sebagai nilai
 - A. Ideal
 - B. Instrumental
 - C. praksis
 - D. fleksibilitas



Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian

Unit 1

Rubrik Penilaian 1

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat laporan singkat praktik demokrasi Pancasila di lingkungan Warga Belajar di kertas folio, <i>Whats App</i> , atau <i>e-mail</i> , seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .

Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat praktik demokrasi Pancasila di lingkungan Warga Belajar dengan isi yang benar.				
2	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat praktik demokrasi Pancasila di lingkungan Warga Belajar dengan uraian jelas.				
3	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat praktik demokrasi Pancasila di lingkungan Warga Belajar memberikan minat untuk mempelajari lebih lanjut.				
4	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat praktik demokrasi Pancasila di lingkungan Warga Belajar secara rinci.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

4 : bila tulisan sangat memadai,

3 : bila tulisan memadai,

2 : bila tulisan kurang memadai,

1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat praktik demokrasi Pancasila di lingkungan Warga Belajar disajikan secara logis.				
2	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat praktik demokrasi Pancasila di lingkungan Warga Belajar disajikan secara utuh.				
3	Penjelasan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik.				
4	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat praktik demokrasi Pancasila di lingkungan Warga Belajar disajikan secara inspiratif.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

4 : bila tulisan sangat memadai,

3 : bila tulisan memadai,

2 : bila tulisan kurang memadai,

1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

Unit 2

Rubrik Penilaian 2

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Warga Belajar yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila di kertas folio, <i>Whats App</i> , atau <i>e-mail</i> , seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .

Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Warga Belajar yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila dengan isi yang benar.				
2	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Warga Belajar yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila dengan uraian jelas.				
3	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Warga Belajar yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila memberikan minat untuk mempelajari lebih lanjut.				
4	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Warga Belajar yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila secara rinci.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

4 : bila tulisan sangat memadai,

3 : bila tulisan memadai,

2 : bila tulisan kurang memadai,

1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Warga Belajar yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila disajikan secara logis.				
2	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Warga Belajar yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila disajikan secara utuh.				
3	Penjelasan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik.				
4	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Warga Belajar yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila disajikan secara inspiratif.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

4 : bila tulisan sangat memadai,

3 : bila tulisan memadai,

2 : bila tulisan kurang memadai,

1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

Unit 3

Rubrik Penilaian 3

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat laporan singkat pengaruh globalisasi di sekitar Warga Belajar yang menjadi tantangan nilai-nilai Pancasila di kertas folio, <i>Whats App</i> , atau <i>e-mail</i> , seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .

Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat pengaruh globalisasi di sekitar Warga Belajar yang menjadi tantangan nilai-nilai Pancasila dengan isi yang benar.				
2	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat pengaruh globalisasi di sekitar Warga Belajar yang menjadi tantangan nilai-nilai Pancasila dengan uraian jelas.				
3	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat pengaruh globalisasi di sekitar Warga Belajar yang menjadi tantangan nilai-nilai Pancasila memberikan minat untuk mempelajari lebih lanjut.				
4	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat pengaruh globalisasi di sekitar Warga Belajar yang menjadi tantangan nilai-nilai Pancasila secara rinci.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

4 : bila tulisan sangat memadai,

3 : bila tulisan memadai,

2 : bila tulisan kurang memadai,

1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat pengaruh globalisasi di sekitar Warga Belajar yang menjadi tantangan nilai-nilai Pancasila Indonesia disajikan secara logis.				
2	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat pengaruh globalisasi di sekitar Warga Belajar yang menjadi tantangan nilai-nilai Pancasila disajikan secara utuh.				
3	Penjelasan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik.				
4	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat pengaruh globalisasi di sekitar Warga Belajar yang menjadi tantangan nilai-nilai Pancasila disajikan secara inspiratif.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

4 : bila tulisan sangat memadai,

3 : bila tulisan memadai,

2 : bila tulisan kurang memadai,

1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$



Kunci Jawaban Penilaian Formatif

1. B
2. A
3. B
4. D
5. C
6. C
7. B
8. D
9. C
10. C



Saran Referensi

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tahun 1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tahun 2003 Tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.



Daftar Pustaka

- Alfian. 1985. *Politik, Kebudayaan, dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Arif, Syaiful. 2018. "Pola Pembinaan dan Pendidikan Pancasila, Komparasi Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca-Reformasi", dalam *Prisma*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Persentase Penduduk Buta Huruf menurut Kelompok Umur, Tahun 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- fastnlow.net/wp-content/uploads/2015/11/www.beritasatu.com_.jpg
- <https://jogja.suara.com/read/2020/04/26/153500/hadapi-pandemi-corona-dprd-yogyakarta-sebut-stok-beras-perlu-ditambah>
- <https://www.kompasiana.com/dudunhamdalah/54f42478745513a42b6c8723/pembubaran-bp-7-sebuah-kesalahan-sejarah>, diakses tanggal 7 Juli 2020
- <https://news.detik.com/kolom/d-4573104/pancasila-dan-tantangan-milenial>, akses tanggal 6 Juli 2020
- Jajasan Prapantja . 1964. *Bahan-bahan Indoktrinasi*. Jakarta:Jajasan Prapantja.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tahun 1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).*
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tahun 2003 Tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.*
- Kompas*. 15 Januari 2020. Berkarya Untuk Perubahan, hal. 17.
- Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila.*
- Oesman, Oetojo. dan Alfian. 1996. *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1985. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Suprayogi, dkk. 2018. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: Pusat Pengembangan Karier, Bimbingan Konseling, MKU dan MKDK Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi, Universitas Negeri Semarang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025.*



Profil Penulis



Nama Lengkap: **Dr.At. Sugeng Priyanto, M.Si.**, telepon kantor 0248508014, HP 08122925181, e-mail: atsugeng@mail.unnes.ac.id. Alamat kantor: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Pendidikan tinggi ditempuhnya pada S-1 Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara, IKIP Semarang, S-2 Program Studi Sosiologi Agama, UKSW Salatiga, dan S-3 Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Riwayat pekerjaan sebagai dosen IKIP Semarang yang sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada Fakultas Ilmu Sosial sejak tahun 1989. Mata kuliah yang diampunya antara lain Teori-teori Sosial Budaya, Sosiologi Politik, dan Kurikulum dan Buku Teks. Kegiatan lain dalam sepuluh tahun terakhir antara lain Anggota Tim Pengembang Kurikulum SMP dan Anggota Tim Pengembangan Tata Kelola Sekolah pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Narasumber Nasional Kurikulum 2013, Penilai Buku Teks dan Non-teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah pada Pusat Perbukuan, Pengembang Kurikulum Pendidikan Kesetaraan, serta Pendidikan dan Pelatihan Guru, baik pada tingkat sekolah, kabupatæn/kota, provinsi, maupun nasional.

Judul buku yang ditulis, antara lain *Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VII, VIII, IX*, Penulisan Bersama, Buku Sekolah Elektronik (BSE) Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penulisan Bersama, Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon 1 24 Universitas Negeri Makassar, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penulisan Bersama, tahun 2011, *Dinamika Ideologi Partai Politik Keagamaan Pada Masa Orde Baru*, tahun 2015, *Islam-Jawa: Praktik Keagamaan Masyarakat Miskin Kampung Tambakrejo, Kota Semarang*, tahun 2015. Judul penelitian yang dihasilkan antara lain *Pemberdayaan Masyarakat Korban Bencana Merapi di Kabupaten Magelang*, *Interaksi Kelas Sosial Masyarakat Miskin Kampung Tambakrejo, Kota Semarang*, *Memahami Masyarakat di Pemukiman Kumuh*, dan *Dinamika Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama di Kota Semarang*.